

SUNNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM BACAAN KONTEMPORER MUHAMMAD SYAHRUR

ARIP PURKON

Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: arippurkon@gmail.com

Abstract

Sunna, based on the Islamic Law perspective, has a fundamental role and position. Sunna is one of Islamic Law sources. It always becomes an object of scientific study because it covers God and human aspects. Many studies on Sunna have been studied by many scholars. Muhammad Syahrur, a Syrian intellectual, is one of scholars who tries to restudy the concept of Sunna. He views that all this time, there is a few mistakes of understanding on Sunna among Muslims. He divides Sunna into two categories, sunna risālah and sunna nubuwwah. The former is eternal while the later is sunna dealing with knowledge so that it may change quite the thing. Such a division is an effort to differentiate between transcendent aspect and profane aspect in Sunna.

Key Words : *Sunna, Treatise, Nubuwwah.*

Abstrak

Dalam perspektif hukum Islam, sunnah mempunyai kedudukan dan peran yang sangat fundamental. Sunnah merupakan salah satu sumber hukum Islam. Sunnah senantiasa menjadi objek kajian ilmiah karena dalam sunnah terdapat aspek ketuhanan dan aspek kemanusiaan. Banyak kajian tentang sunnah yang dilakukan oleh para akademisi. Muhammad Syahrur, seorang intelektual dari Syiria, merupakan salah seorang akademisi yang mencoba untuk mengkaji ulang konsep sunnah. Syahrur berpendapat bahwa selama ini ada sedikit kekeliruan pemahaman mayoritas umat Islam tentang sunnah. Syahrur membagi sunnah menjadi dua kategori, yaitu sunnah risālah dan sunnah nubuwwah. Sunnah risālah merupakan sunnah yang bersifat abadi, sedangkan sunnah nubuwwah merupakan sunnah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sehingga dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya pembagian sunnah menjadi dua bagian ini merupakan upaya untuk membedakan antara aspek yang transendental dan profan dalam sunnah.

Kata Kunci: *sunnah, risalah, nubuwwah.*

Pendahuluan

Hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat di mana masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan masyarakat dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi dan yang lainnya. Perubahan dalam masyarakat dapat terjadi disebabkan karena adanya penemuan-penemuan baru yang merubah sikap hidup dan menggeser cara pandang serta membentuk pola alur berfikir dan menimbulkan konsekuensi dan membentuk norma dalam kehidupan bermasyarakat.

Karena hukum Islam berada di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat senantiasa mengalami perubahan maka hukum Islam perlu dan bahkan harus senantiasa memperhatikan perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini harus dilakukan agar hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia di setiap tempat dan waktu. Dalam hukum Islam ada satu kaidah yang menyebutkan bahwa kebiasaan dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum (*al-'ādah muhakkamah*) selama kebiasaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri.

Muhammad Syahrur adalah salah seorang pemikir kontroversial yang dianggap liberal dari Syria dan memiliki kesadaran kritis untuk mengkaji ulang nalar (*episteme*) klasik yang masih tertanam kuat dalam kesadaran dan keyakinan umat Islam. Dengan keras dan tajam, ia mengkritik konservatisme pemikiran Islam dan berusaha untuk mendekonstruksi hegemoni pemikiran klasik yang masih tertanam kuat dalam pengetahuan dan kesadaran umat Islam. Sebab, nalar klasik dengan segala karya yang telah dihasilkannya bukanlah produk pemikiran yang semuanya bersifat sakral dan harus diterapkan dalam segala ruang dan waktu. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya perbedaan jarak waktu yang terlampau jauh antara dulu dan sekarang. Disamping itu juga karena sebagian produk pemikiran klasik ada juga yang dirasakan sudah kurang relevan dengan konteks sekarang, sehingga jika tidak dikaji ulang secara kritis akan membahayakan masa depan umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, dengan lantang ia menyerukan kepada segenap umat Islam untuk mengkaji kembali pemikiran keislaman selama ini sampai ke akar-akarnya yang paling dalam, yaitu sistem pemikiran (*episteme*) yang selama ini dianut oleh umat Islam¹.

Sunnah Rasulullah merupakan salah satu sumber hukum Islam selain al-Qur'ān. Sunnah senantiasa dikaji secara akademis sejak dahulu sampai saat ini. Hal ini dapat dipahami karena sunnah

mempunyai posisi yang penting dalam hukum Islam. Berkaitan dengan sunnah sebagai sumber hukum, Muhammad Syahrur mempunyai kajian yang sedikit berbeda dengan yang selama ini dipahami oleh mayoritas umat Islam. Tulisan ini akan mengkaji tentang konsep sunnah sebagai sumber hukum menurut Muhammad Syahrur.

Riwayat Hidup Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur adalah seorang insinyur berkebangsaan Siria yang dilahirkan pada tanggal 11 April 1938². Syahrur mengawali karir intelektualnya pada pendidikan dasar dan menengah di tanah kelahirannya yaitu di lembaga pendidikan Abdurrahman al-Kawâkibi, Damaskus. Pendidikan menengahnya ia selesaikan pada tahun 1957. Setelah menuntaskan pendidikan menengahnya, Syahrur melanjutkan studinya ke Moskow, Uni Soviet (sekarang Rusia) untuk mempelajari teknik sipil (*handasah madaniyyah*) atas beasiswa pemerintah setempat. Di negara inilah Syahrur mulai berkenalan dan kemudian mengagumi pemikiran Marxisme, walaupun ia tidak memproklamirkan diri sebagai penganut aliran tersebut. Namun demikian, sebagaimana dikemukakannya sendiri pada Peter Clark, ia mengakui banyak berhutang budi pada sosok Hegel dan Alfred North Whitehead. Gelar diploma dalam bidang teknik sipil (*handasah madaniyyah*) ia raih pada tahun 1964. Setelah menyelesaikan studinya, ia kembali ke Siria pada tahun 1964 dan bekerja sebagai dosen di Universitas Damaskus³.

Pada tahun 1967, Syahrur memperoleh kesempatan melakukan penelitian di Imperial College di London, Inggris. Namun ia terpaksa pulang kembali ke Siria karena terjadi perang Juni antara Siria dan Israel yang mengakibatkan putusnya hubungan diplomatik antara Siria dengan Inggris. Akhirnya Syahrur memutuskan pergi ke Dublin, Irlandia sebagai utusan dari Universitas Damaskus untuk mengambil program Magister dan Ph.D di Universitas Nasional Irlandia mengambil bidang teknik sipil (*al-handasah al-madaniyyah*) dengan spesialisasi bidang teknik pondasi dan mekanika tanah. Gelar Doktor ia peroleh pada tahun 1972. Sejak itulah, Syahrur secara resmi menjadi staf pengajar di Universitas Damaskus⁴.

Meskipun dasar pendidikan Syahrur adalah teknik, namun hal ini bukan berarti bahwa ia sama sekali tidak mempunyai perhatian terhadap wacana pemikiran keislaman. Di kemudian hari sejarah mencatat bahwa Syahrur akhirnya tertarik untuk mengkaji al-Qur'ân dan hadits secara lebih serius dengan pendekatan filsafat

bahasa dan dibingkai dengan teori ilmu eksaktanya, bahkan ia juga menulis buku dan artikel tentang pemikiran keislaman.

Dilihat dari latar belakang pendidikannya, secara formal Syahrur belum pernah menempuh studi dalam bidang keislaman. Namun Syahrur belajar secara non formal dan otodidak tentang kajian keislaman khususnya dalam bidang penafsiran al-Qur'an. Hal ini dilakukannya selama puluhan tahun. Pemikiran-pemikirannya tentang keislaman banyak mendapatkan kritik dan apresiasi di dunia Islam.

Pengertian Sunnah

Syahrur berpendapat bahwa definisi sunnah yang secara umum dipahami adalah keliru. Definisi bahwa sunnah Nabi adalah segala yang berasal dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, perintah, larangan dan ketetapan⁵ merupakan sesuatu yang keliru. Definisi ini bukan definisi yang diberikan oleh Nabi sendiri atau para sahabat sehingga dapat diterima atau ditolak. Definisi ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kebekuan dalam umat Islam. Nabi dan para sahabat tidak pernah mengenal definisi sunnah seperti ini. Dan yang menjadi dasar penetapan syariat dalam Islam adalah al-Kitāb dan sunnah, dengan definisinya yang telah diperbaharui, bukan al-Kitab dan hadits⁶.

Sunnah menurut Syahrur adalah :

‘Metode penerapan hukum-hukum umm al-Kitāb secara mudah tanpa keluar dari batasan-batasan hukum Allah dalam masalah-masalah yang terkait dengan hudūd atau untuk menetapkan batasan-batasan yang bersifat lokal temporal dalam masalah-masalah di luar hudūd. Usaha tersebut dilakukan dengan memperhatikan realitas nyata, ruang, waktu dan kondisi-kondisi obyektif yang menjadi wilayah dan ruang gerak bagi penerapan hukum-hukum tersebut dengan tetap berdasar pada firman Allah⁷. Hal ini antara lain berlandaskan pada al-Qur‘ān surat al-Baqarah ayat 185 dan surat al-Haj ayat 78.

Apabila dianalisis, sebenarnya definisi sunnah yang dipahami selama ini yaitu sesuatu yang berasal dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat merupakan definisi yang bersifat umum. Adapun definisi yang dikemukakan oleh Syahrur adalah bagian dari definisi tersebut yaitu berkaitan dengan fungsi sunnah.

Dari sisi muatan hukumnya, sunnah mempunyai tiga kategori, yaitu kategori pertama adalah sunnah yang bermuatan syariah. Sunnah dalam bentuk ini adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai pembawa *risālah*, misalnya tata cara shalat, shaum, haji dan ibadah *mahdlah* lainnya. Sunnah ini wajib dilaksanakan oleh umat Islam karena merupakan syariat dari Allah. Kategori kedua adalah sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai manusia dan orang Arab, seperti bentuk pakaian, jenis makanan dan kendaraan. Sunnah dalam bentuk ini tidak wajib untuk diikuti, namun apabila dilaksanakan biasanya akan menambah kecintaan kepada Rasulullah. Walaupun sunnah dalam bentuk seperti ini tidak wajib diikuti akan tetapi umat Islam perlu memahami *maqāshid asy-syari'ah* dari sunnah dimaksud. Hal ini bertujuan agar nilai yang dilaksanakan oleh Rasulullah dalam sunnahnya dapat dipahami dan tetap dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan sunnah yang dikhususkan untuk Rasulullah, misalnya kebolehan mempunyai lebih dari empat orang istri dalam satu waktu dan tidak boleh menerima zakat atau shadaqah. Sunnah dalam bentuk ini tidak berlaku untuk umat Islam⁸.

Syahrur berpendapat bahwa kata sunnah berasal dari kata *sanna* yang dalam Bahasa Arab berarti kemudahan dan mengalir dengan lancar, seperti dalam kalimat *maun masnūn*, yang berarti air yang mengalir dengan lancar. Prinsip inilah yang dipegang Nabi Saw, yaitu dengan menerapkan hukum-hukum *Umm al-Kitāb* dalam lingkup batasan hukum Allah dan terkadang sampai pada batas maksimalnya dengan tetap mempertimbangkan realitas obyektif yang bersifat relatif semasa beliau hidup, bukan zaman sekarang, dan tidak pernah sekalipun dan dimanapun beliau bersikap ragu atau memutuskan sesuatu sebagai sesuatu yang mutlak⁹.

Makna sunnah secara etimologi yang dikemukakan Syahrur hanya salah satu dari makna sunnah. Makna sunnah yang lain antara lain adalah cara yang biasa dilakukan, yang baik maupun yang buruk, kebiasaan yang berlaku dan jalan yang diikuti. Para ulama memberikan makna khusus terhadap kata sunnah dari al-Qur'an dan bahasa Arab dengan cara yang biasa dilakukan dalam pengamalan agama. Makna sunnah seperti inilah yang dikenal dalam periode awal Islam¹⁰.

Oleh karena itu maka apa yang telah dilakukan oleh Nabi di tanah Arab pada abad ketujuh merupakan model pertama bagaimana cara manusia berinteraksi dengan Islam pada ruang dan

waktu tertentu, bukan satu-satunya dan bukan pula yang terakhir. Beliau adalah penutup para Nabi dan Rasul sehingga cara beliau dalam sunnahnya adalah cara paling efektif untuk menjaga spirit kehidupan *risālah* dan *nubuwwah* hingga hari kiamat. *Risālah* beliau terdiri dari batasan-batasan hukum. Dan beliau adalah satu-satunya Rasul yang memperoleh hak untuk melakukan ijtihad karena posisi beliau sebagai Rasul terakhir¹¹.

Definisi sunnah yang dikemukakan Syahrur terlalu dipengaruhi oleh salah satu pengertian sunnah secara etimologi. Padahal secara etimologi makna sunnah tidak hanya ada satu.

Karakteristik Sunnah

Syahrur membagi sunnah menjadi dua macam, yaitu sunnah *risālah* dan sunnah *nubuwwah*. Sunnah *risālah*, sebagaimana al-Kitab, dapat dibedakan isinya menjadi *al-hudūd* (batas-batas dalam hukum), ibadah, akhlak dan pengajaran (*at-ta'limāt*). Adapun sunnah *nubuwwah* Syahrur membaginya menjadi dua macam, yakni yang berkenaan dengan persoalan ghaib dan yang berkenaan dengan penjelasan terhadap *tafshil al-kitāb*, sehingga menurutnya memahami hadits haruslah didasarkan atas pemahaman terhadap al-Kitab dan bukan sebaliknya¹².

Kriteria masing-masing kategori pembagian sunnah yang disebutkan Syahrur belum jelas. Pembagian ini tampaknya hanya melihat esensi dari sunnah, bukan dari segi datang (*wurūd*)-nya.

Kedudukan dan Fungsi Sunnah

Salah satu fungsi sunnah Nabi menurut Syahrur adalah pembatasan terhadap yang mutlak (*taqyīd al-muthlaq*) dan pemutlakan terhadap hal yang dibatasi (*ithlāq al-muqayyad*)¹³ dalam wilayah *al-halāl* (yang dibolehkan). Pembatasan dan pemutlakan tersebut menggambarkan dimensi pembentukan bagi fluktuasi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dalam bingkai umum yang membatasi wilayah *al-haram* (yang dilarang) dan wilayah *al-halāl* (hal yang dibolehkan)¹⁴.

Lebih lanjut lagi Syahrur menjelaskan bahwa hal lain yang dianggap penting dalam masalah sunnah ini adalah memahami peran Muhammad Saw sebagai seorang Nabi. Sunnah Nabi memiliki beberapa karakteristik khusus, yaitu merupakan ketetapan-ketetapan yang lahir dari kondisi kehidupan objektif dalam masyarakat Arab pada masa kenabian. Oleh karena itu

maka sunnah merupakan ijtihad dalam membatasi sesuatu yang dihالalkan (*al-halāl*) serta tidak membutuhkan terhadap adanya wahyu. Ijtihad ini merupakan ijtihad yang bersifat pembatasan dalam wilayah yang dihالalkan secara mutlak, dimana sesuatu yang telah dibatasi tadi dimungkinkan untuk dimutlakkan kembali seiring dengan perubahan kondisi objektif yang ada. Selain itu, ijtihad ini juga merupakan ijtihad dalam wilayah yang dihالalkan, yang kemungkinan bisa salah dan benar, karena ia bukanlah wahyu dan karena kesalahan di dalamnya bisa dibenarkan kembali¹⁵.

Sunnah juga, menurut Syahrur, merupakan ketetapan-ketetapan dari ijtihad Nabi dalam wilayah yang dihالalkan, tanpa memandang sumbernya apakah bersifat kenabian atau bukan, yang bukan termasuk syariat Islam, tetapi hanyalah merupakan undang-undang sipil (*qānūn madanī*) yang tunduk pada kondisi sosial. Hal ini berarti bahwa Nabi semasa hidupnya telah menetapkan undang-undang sipil untuk mengatur masyarakat dalam wilayah yang dihالalkan dan untuk membangun pemerintahan serta masyarakat Arab pada abad ketujuh. Karena itulah maka ia tidak bersifat abadi sekalipun terdapat ratusan hadits mutawatir dan shahih yang meriwayatkan hal tersebut¹⁶.

Salah satu contoh ketetapan ijtihad atau fungsi sunnah Nabi dalam hal membatasi sesuatu yang dihالalkan secara mutlak dan kemudian Nabi memutlakkan kembali sesuatu yang telah dibatasi tersebut adalah masalah ziarah kubur bagi perempuan. Pada saat itu, kaum perempuan ketika ditinggal mati oleh salah satu anggota keluarganya terutama suami, maka mereka menyayat-nyayat tubuh, merobek-robek pakaian dan menaburkan debu di atas kepala sebagai ungkapan untuk menunjukkan posisi si mayit dan untuk meratapinya. Perempuan-perempuan Arab juga menziarahi makam-makam untuk menghidupkan ingatan terhadap mereka yang sudah meninggal dunia. Maka Nabi datang untuk melarang kaum perempuan berziarah kubur dan menyayat-nyayat tubuh ketika ada anggota keluarganya yang meninggal dunia.

Apabila dianalisis, maka riwayat ini memberikan pemahaman bahwa Nabi Saw tidak mengharamkan kesedihan atas meninggalnya seseorang, menghidupkan ingatan terhadap orang yang sudah meninggal atau ziarah kubur, karena hal itu adalah berada dalam wilayah *al-halāl*. Walaupun demikian, Nabi melarangnya karena adat istiadat masyarakat Jahiliyah yang sudah dianggap oleh orang-orang Arab sebagai bagian yang tidak terlepas dari wilayah halal yang

mutlak tersebut, padahal itu bukanlah termasuk bagian dari syariat yang diwahyukan¹⁷.

Setelah pemahaman dan keimanan telah tertanam kuat dalam hati sebagian besar umat Islam, maka Nabi melonggarkan kembali terhadap apa yang telah dibatasi sebelumnya dan Nabi mengizinkan bagi kaum perempuan untuk berziarah kubur. Akan tetapi problem pokoknya itu berasal dari adanya pemahaman terhadap pembatasan (*at-taqyīd*) dan pemutlakan kembali (*al-ithlāq*) tersebut, yaitu ketika ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan pengharaman terhadap yang halal dan kemudian menganggapnya sebagai ajaran syariah¹⁸. Padahal Nabi melakukannya tidaklah lebih dari sekadar menerapkan peraturan sipil yang termasuk dalam wilayah yang dihalalkan, yang dipandang Nabi. lebih sesuai dan tepat dalam situasi objektif yang berlaku¹⁹. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 7. Ayat ini menjelaskan bahwa ungkapan: *wa mā ātākum ar-rasūl fa'khubdżūhu* adalah berarti kumpulan. perundang-undangan tambahan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad Saw untuk membangun pemerintahannya yang bersifat relatif dan bukannya untuk membangun sesuatu yang mutlak. Hal itulah yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat dalam segala zaman. Sedangkan ungkapan dalam firman-Nya *wa mā nahākum 'anhū fantahū* menjelaskan bahwa hal itu merupakan petunjuk bahwa bagi Nabi terdapat hak untuk memerintahkan dan melarang, akan tetapi tidak ada hak bagi beliau untuk menghalalkan dan mengharamkan. Terdapat perbedaan yang sangat jelas antara melarang (*an-nahyi*) dan mengharamkan (*at-tahrim*). Halal dan haram adalah bersifat *tauqifi* (petunjuk) dari Allah semata, sementara perintah dan larangan adalah merupakan hak bersama antara Allah dan manusia. Allah menghalalkan dan mengharamkan sekaligus memerintah dan melarang, sedangkan manusia hanya memerintah dan melarang saja²⁰.

Dalam ushul fiqh dijelaskan bahwa banyak ungkapan yang digunakan al-Qur'an dan sunnah untuk menunjukkan haram. Diantaranya adalah tuntutan yang langsung menggunakan lafaz *at-tahrim* dan yang seakar dengannya, *sighat an-nahyi*, tuntutan untuk menjauhi suatu perbuatan, lafaz *lā yabillu*, suatu perbuatan yang dibarengi dengan ancaman hukuman baik di dunia maupun di akhirat dan setiap lafaz yang menunjukkan pengingkaran yang muat terhadap suatu pekerjaan²¹.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Syahrur mengklasifikasikan sunnah ke dalam dua kategori, yaitu sunnah risalah dan sunnah nubuwwah. Sunnah nubuwwah terdiri dari ilmu--

ilmu, sedangkan sunnah risalah terdiri dari berbagai hukum dan ajaran. Ketaatan berlaku pada sunnah risalah dan bukan pada sunnah nubuwah. Dalam al-Kitab tidak ada satu ayat pun yang berbunyi *athī'u an-nabi*. Tetapi yang ada adalah ayat-ayat yang mempunyai redaksi *athī'u ar-rasūl*. Walaupun demikian, Allah memuji kepada Muhammad Saw dengan pujian yang luar biasa dalam kapasitas beliau sebagai Nabi²² Hal ini sebagaimana dalam al-Qur'ān surat al-Ahzab ayat 56.

Adapun sunnah risalah terdiri dari tema *hudūd*, ibadah, akhlak dan ajaran-ajaran. Dalam *umm al-Kitāb* terdapat sejumlah perintah dan peringatan yang ditujukan kepada Nabi Saw yang disampaikan dengan redaksi *yā ayyuhā an-nabiyyu*. Ayat-ayat seperti ini terdiri dari ajaran-ajaran, petunjuk atau kondisi-kondisi khusus yang berlaku bagi Nabi dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah halal haram²³. Ketaatan berlaku kepada Muhammad Saw dalam kapasitas kerasulannya berdasarkan al-Qur'ān surat an-Nisā' ayat 59 dan al-Ahzāb ayat 29. Redaksi yang digunakan pada ayat dimaksud adalah *rasūlallāh* dan bukan *nabiyyallāh*.

Dalam sunnah risalah ada dua bentuk ketaatan, yaitu ketaatan tersambung dan ketaatan terputus. Ketaatan tersambung (*ath-thā'ah al-muttashilah*) adalah jenis ketaatan yang memadukan antara ketaatan kepada Rasul dan ketaatan kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'ān surat Ali Imran ayat 132 dan an-Nisa ayat 69.

Dari kedua ayat dimaksud dapat dipahami bahwa ketaatan kepada Rasul dipadukan dengan ketaatan kepada Allah dalam satu ketaatan. Ketaatan dalam bentuk ini berlaku sejak beliau hidup dan berlanjut sesudah kewafatannya, sebagaimana ketaatan kepada Allah yang tidak ada batas waktunya. Ketaatan dalam bentuk ini berlaku dalam wilayah *hudūd*, ibadah dan akhlak²⁴.

Adapun ketaatan terputus (*al-thā'ah al-munfashilah*) adalah jenis ketaatan yang dijelaskan dalam al-Qur'ān surat al-Nisa ayat 59 dan al-Maidah ayat 92.

Ketaatan kepada Rasul dalam bentuk ini diposisikan sebagai ketaatan yang terpisah atau berbeda dari ketaatan kepada Allah, yaitu ketaatan yang hanya berlaku ketika Rasulullah masih hidup dan tidak berlaku setelah beliau wafat. Ketaatan dalam bentuk ini wujudnya antara lain adalah ketaatan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai manusia pada umumnya dan pada hukum-hukum yang bersifat temporal. Ketaatan ini juga berlaku dalam berbagai masalah dan keputusan yang beliau ambil sebagai kepala negara, hakim atau sebagai

pemimpin tentara. Demikian juga dalam hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah kerumahtanggaan, makanan, minuman dan pakaian. Ketaatan ini mengikuti adat kebiasaan bangsa Arab dan bergerak dalam ruang-ruang batasan hukum Allah tanpa keluar darinya. Mengikuti ketaatan jenis ini harus mengingat bahwa dalam kondisi ketika batas maksimal harus diberlakukan, Rasulullah berhenti tepat di atasnya. Hal-hal ini harus dipahami dengan pemahaman kontemporer tentang konsep isi dan bukan dalam konsep bentuk. Apabila ada hal-hal yang dirasakan masih relevan untuk saat ini maka dapat diambil dan dilaksanakan, sedangkan hal-hal yang dianggap kurang relevan pada saat ini maka dapat dicarikan bentuk yang lain²⁵.

Dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *maqāshid asy-syarī'ah* yaitu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada nilai-nilai yang berupa kemaslahatan dalam setiap taklif yang diberikan Allah, terutama sekali karena teks al-Qur'ān dan sunnah terbatas sementara permasalahan terus berkembang²⁶. Dengan demikian, maka ketaatan kepada Rasul bukan berarti tidak berlaku lagi, hanya bentuknya yang berbeda.

Lebih jauh Syahrur menegaskan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengkaji sunnah ini, yaitu bahwa sunnah adalah metode penerapan al-Kitab dengan memberikan keluasan gerak di antara berbagai batasan hukum Allah (*hudūd*), berhenti pada batas tersebut, menetapkan batasan baru yang sesuai dengan batasan hukum Allah, atau menetapkan batasan yang bersifat lokal temporal (*marbaliyah*). Perlu dipertimbangkan kedudukan al-Kitab sebagai sisi mutlak transendental dari Islam, sedangkan sunnah menduduki sisi manusiawi dari Islam yang menjadi objek ijtihad manusia²⁷.

Dalam ushul fiqh, fungsi sunnah terhadap al-Qur'ān antara lain dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sunnah yang berfungsi memperkuat apa yang telah ditetapkan al-Qur'ān, memperjelas atau merinci apa yang telah digariskan dalam al-Qur'ān dan menetapkan hukum yang belum diatur –secara eksplisit- di dalam al-Qur'ān²⁸.

Selain itu juga perlu melakukan kajian ulang terhadap berbagai kitab hadits dengan metodologi pengklasifikasian hadits Nabi ke dalam kategori hadits-hadits kenabian dan hadits-hadits risalah. Hadits-hadits risalah diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu pertama, kategori hadits yang secara tekstual dan esensial harus dipahami berdasarkan nash al-Kitab, seperti hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah ibadah, hudud dan akhlak,

dan kedua, hadits-hadits yang harus dipahami secara metodologis saja, seperti hadits-hadits yang menyiratkan pendefinisian. atas konsep tertentu. Sebagai contoh, untuk memahami hadits tentang pencurian, maka terlebih dahulu harus mendefinisikan siapa yang disebut sebagai seorang pencuri (*as-sāriq*) sebelum kita memotong tangannya, karena Nabi juga menetapkan demikian. Dalam hal ini yang menjadi keharusan adalah cara atau metode pendefinisian suatu konsep, bukan materi definisi itu sendiri. Atas dasar ini maka harus ada penegasan bahwa hadits-hadits kenabian tidak memuat ajaran tentang halal dan haram²⁹.

Dan juga perlu adanya pengkajian kembali hadits-hadits yang membicarakan hal-hal metafisik (*gaibiyāt*) berdasarkan perspektif pembacaan modern terhadap al-Qur'ān serta pengkajian secara komprehensif hadits-hadits yang membicarakan tentang halal haram dan *budūd* yang secara tekstual tidak tercantum dalam al-Kitab. Kita perlu memposisikan hadits-hadits tersebut sebagai hadits yang bersifat lokal temporal, seperti hadits-hadits yang membicarakan tentang nyanyian, musik dan lukisan. Hadits-hadits seperti ini perlu dipahami sebagai hadits yang dibatasi oleh kondisi sosio kultural yang melingkupi kehidupan Nabi pada masa beliau hidup. Sejalan dengan perspektif ini, maka perlu dipahami bahwa hadits-hadits metafisik yang tidak sesuai dengan konsep-konsep metafisik dalam al-Qur'ān seperti tentang siksa kubur dan ruh adalah rahasia kehidupan, sebagai hadits-hadits yang lemah, tidak valid dan tidak dapat dijadikan rujukan³⁰.

Pada tataran ini tampaknya Syahrur tidak memperhatikan masalah pokok yang menjadi ukuran dalam sunnah yaitu sanad. Syahrur hanya melihat sunnah dari sisi muatannya saja sebagai sebuah produk ijtihad seorang (Nabi) Muhammad SAW dalam mengamalkan al-Qur'ān pada masanya. Apabila tidak hati-hati, hal ini akan membawa pada desakralisasi seluruh sunnah, sehingga sunnah menjadi bersifat relatif dan temporer.

Kesimpulan

Sunnah dalam kajian Syahrur didefinisikan sebagai metode penerapan hukum-hukum *umm al-Kitāb* secara mudah tanpa keluar dari batasan-batasan hukum Allah dalam masalah-masalah yang terkait dengan *budūd* atau untuk menetapkan batasan-batasan yang bersifat lokal temporal dalam masalah-masalah di luar *budūd*. Usaha tersebut dilakukan dengan memperhatikan realitas nyata, ruang, waktu dan kondisi-kondisi obyektif yang menjadi wilayah dan ruang

gerak bagi penerapan hukum-hukum tersebut dengan tetap berdasar pada firman Allah.

Syahrur membagi sunnah menjadi dua kategori, yaitu sunnah *risālah* dan sunnah *nubuwwah*. Sunnah *risālah* dapat dibedakan isinya menjadi *al-hudūd* (batas-batas dalam hukum), ibadah, akhlak dan pengajaran (*at-ta'limāt*). Adapun sunnah *nubuwwah* adalah sunnah yang berkenaan dengan persoalan *gāib* dan penjelasan terhadap *tafshīl al-kitāb*. Atau dengan bahasa lain bahwa sunnah *nubuwwah* terdiri dari ilmu-ilmu, sedangkan sunnah *risalah* terdiri dari berbagai hukum dan ajaran. Ketaatan berlaku pada sunnah *risalah* dan bukan pada sunnah *nubuwwah*.

Oleh karena itu maka ketaatan kepada Rasul ada dua, yaitu ketaatan tersambung (*ath-thā'ah al-muttashilah*) dan ketaatan terputus (*ath-thā'ah al-munfashilah*). Ketaatan tersambung merupakan ketataatan pada sunnah sekaligus kepada Allah Swt sehingga tidak pernah terputus dengan wafatnya Rasul. Adapun ketaatan terputus merupakan ketaatan yang bersifat temporal.

Catatan Akhir:

¹Lihat Pengantar Buku Muhammad Syahrūr, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Penerjemah Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004).

²Peter Clark, "The Shahrur Phenomenon, A Liberal Islamic Voice from Syria", dalam *Islam and Christian Muslim Relation*, Vol.7 No.3, h. 336. Beberapa pengkaji Syahrur ada yang keliru dalam menulis bulan kelahiran Syahrur pada Maret dan bukannya April.

³Peter Clark, "The Shahrur Phenomenon...", h. 337.

⁴Peter Clark, "The Shahrur Phenomenon...", h. 337.

⁵Muhammad A'jaz al-Khatīb, *Ushul al-Hadits*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1975), h. 19.

⁶Muhammad Syahrūr, *Al-Kitāb wa al-Qur'an; Qirā'ah Mu'ashirah*, (Syria: Al-Ahali li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, 2000), h.548

⁷Muhammad Syahrūr, *Al-Kitāb wa al-Qur'an...*, h. 549.

⁸Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islāmi*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'ashir, 2004), jilid I, h. 478.

⁹Muhammad Syahrūr, *Al-Kitāb wa al-Qur'an...*, h.549

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 2000), h. 73-74.

¹¹Muhammad Syahrūr, *Al-Kitāb wa al-Qur'an...*, h.549.

¹²Muhammad Syahrūr, *Al-Kitāb wa al-Qur'an...*, h. 549-554.

¹³Tampaknya definisi mutlak dan muqayyad yang dimaksud Syahrur berbeda dengan yang dikemukakan oleh para ulama ushul al-fiqh. Dalam ushul al-fiqh, mutlaq didefinisikan antara lain adalah lafal yang menunjukkan hakikat zat sesuatu tanpa menyebut suatu ketentuan yang membatasinya. Adapun muqayyad

didefinisikan antara lain adalah lafal yang menunjukkan zat sesuatu yang dibatasi oleh suatu ketentuan. Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi...*, jilid I, h. 208-209.

¹⁴Muhammad Syahrūr, *Nahwa Ushūl Jadidah li al-Fiqh al-Islāmi; Fiqh al-Mar'ah (al-Waṣīyyah, al-Irṭs, al-Qawāmah, al-Ta'addudīyyah, al-Libās)*, (Syria: Al-Ahālī li al-Thibā'ah wa al-Nasyr, 2000), h.151

¹⁵Muhammad Syahrūr, *Nahwa Ushūl Jadidah...*, h. 151

¹⁶Dari beberapa karakteristik sunnah Nabi yang dikemukakan, tampaknya Syahrur hanya melihat sunnah Nabi yang merupakan hasil ijtihad Nabi yang terlepas dari wahyu. Permasalahan ijtihad Nabi ini sejak dahulu sudah menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Pembahasan tentang ijtihad Rasulullah ini nampaknya cukup luas dan berbelit-belit. Secara teoritis umumnya para ulama berpendapat bahwa ijtihad Rasulullah terjadi dalam urusan-urusan keduniawian seperti dalam menentukan taktik dan strategi peperangan serta keputusan-keputusan yang berhubungan dengan perselisihan dan persengketaan. Walaupun secara teoritis terdapat semacam kesepakatan, tetapi ditinjau dari segi agama (syara') para ulama berbeda pendapat dalam seluruh persoalan termasuk juga dalam masalah dunia. Al-Syaukani, *Irryād al-Fuhūl*, (Kairo: Dār al-Thibā'ah al-Munirah, t.t), h. 234, Abū Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Al-Mustashfā fi 'Ilm al-Ushūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 252

¹⁷Muhammad Syahrūr, *Nahwa Ushūl Jadidah...*, h. 151 - 152

¹⁸Dalam masalah ziarah kubur, ulama tidak mengatakan pengharaman terhadap yang halal, tetapi bahwa ziarah kubur itu dulunya pernah dilarang oleh Nabi lalu diperbolehkan. Dari sini kemudian memunculkan perbedaan pendapat tentang kaidah *al-amr ba'da al-nahy*. Ulama terbagi menjadi tiga pendapat, yaitu pertama bahwa perintah setelah larangan menunjukkan wajib, kedua berpendapat bahwa perintah setelah larangan menunjukkan boleh dan ketiga berpendapat bahwa perintah setelah larangan mempunyai hukum sesuai dengan hukum sebelum adanya larangan tersebut. Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi...*, jilid I, h. 223-224.

¹⁹Muhammad Syahrūr, *Nahwa Ushūl Jadidah...*, h. 152

²⁰Muhammad Syahrūr, *Nahwa Ushūl Jadidah...*, h. 155

²¹Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi...*, jilid II, h. 80-81.

²²Muhammad Syahrūr, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān...*, h. 549-550.

²³Muhammad Syahrūr, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān...*, h. 550

²⁴Muhammad Syahrūr, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān...*, h. 550.

²⁵Muhammad Syahrūr, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān...*, h. 552.

²⁶Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi...*, jilid II, h. 1017.

²⁷Muhammad Syahrūr, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān...*, h. 571

²⁸Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushūl al-Fiqh*, (Kuwait: Dār al-Ilm, 1978), h. 39-40.

²⁹Muhammad Syahrūr, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān...*, h. 571.

³⁰Muhammad Syahrūr, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān...*, h. 572

DAFTAR PUSTAKA

- al-Gazali, Abû Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustashfâ fî 'Ilm al-Ushûl*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- al-Khatîb, Muhammad A'jaz, *Ushûl al-Hadîts*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1975.
- al-Syaukani, *Iryâd al-Fuhûl*, Kairo: Dâr al-Thiba'ah al-Munirah, t.t.
- al-Zuhaili, Wahbah, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, 2004.
- Clark, Peter. "The Shahrur Phenomenon, A Liberal Islamic Voice from Syria", dalam *Islam and Christian Muslim Relation*, Vol.7 No.3.
- Khallaf, Abd. al-Wahhab, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-'Ilm, 1978.
- Syahrûr, Muhammad, *Al-Kitâb wa al-Qur'ân; Qirâ'ah Mu'âshirah*, Syria: Al-Ahali li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, 2000
- *Nahwa Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmi; Fiqh al-Mar'ah (al-Wasiyyah, al-Irts, al-Qawâmah, al-Ta'addudiyyah, al-Libâs)*, Syria: Al-Ahâli li al-Thibâ'ah wa al-Nasyr, 2000
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 2000